

**Relevansi Konsep Uang Dalam Perspektif Ibnu Khaldun terhadap
Kebijakan Moneter Indonesia**

Sholikul Hadi

Sharia Banking and Business Consulting (SBBC) Indonesia
sbbc.consult@yahoo.com

Moh. Romli

UIN Jakarta

romli.iainlaaroiba@gmail.com

ABSTRACT

Ibn Khaldun was a Muslim scientist who had brilliant ideas about the concept of money (751-808 H / 1350-1406 AD). This study aims to examine Ibn Khaldun's concept of money and monetary policy in the economy and the relevance of his thinking to monetary policy in Indonesia. This research uses library research design (Library Research) with a historical and descriptive approach. The data collection technique chosen is the documentation technique, namely the data collection technique by examining relevant literature with the chosen title. In the analysis phase content analysis techniques are used and combined with historical continuity methods to answer the problem formulation that is proposed. The data analysis stage is through the stages of linguistic analysis and concept analysis. The results showed that: 1) the emergence of the concept of Ibn Khaldun's money and monetary system in the economy was motivated by the economic and political conditions experienced during Ibn Khaldun's life. History says that Muqadimah Ibn Khaldun was written based on the results of his thoughts combined with life experiences he experienced; 2) The concept of Ibn Khaldun is relevant if it is applied in the monetary system in Indonesia. This is based on the real conditions faced by Indonesia, which currently uses empty money. Even though its existence is now proven to have caused crises many times. So it is not impossible if gold and silver coins are used as the standard of money value.

Key word: Concept of Money, Monetary Policy

ABSTRAK

Ibnu Khaldun memiliki pemikiran-pemikiran brilian tentang konsep uang (751-808 H/1350-1406 M). Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep Ibnu Khaldun tentang uang dan kebijakan moneter dalam perekonomian dan relevansi pemikirannya terhadap kebijakan moneter di Indonesia. Penelitian ini menggunakan desain studi pustaka (*Library Research*) dengan pendekatan historis dan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipilih adalah teknik dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji literatur yang relevan dengan judul yang telah dipilih. Dalam tahap analisis digunakan teknik *content analysis* dan dipadukan dengan metode kesinambungan historis untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan. Tahap analisis data melalui tahapan analisis linguistik dan analisis konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) munculnya konsep uang Ibnu Khaldun dan sistem moneter dalam perekonomian dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi dan politik yang dialami semasa Ibnu Khaldun hidup. Sejarah menyebutkan bahwa Muqadimah Ibnu Khaldun ditulis berdasarkan

hasil pemikirannya yang dipadukan dengan pengalaman hidup yang dialaminya; 2) Konsep Ibnu Khaldun tersebut relevan jika diterapkan dalam sistem moneter di Indonesia. Hal ini didasarkan pada kondisi riil yang dihadapi Indonesia, yang mana saat ini menggunakan uang hampa. Padahal keberadaannya yang sekarang ini telah terbukti menimbulkan krisis berkali-kali. Maka bukan suatu hal yang mustahil jika uang emas dan perak dijadikan sebagai standar nilai uang.

Kata Kunci: Konsep Uang, Kebijakan Moneter

PENDAHULUAN

Untuk mencapai atau menjamin berfungsinya sistem moneter secara baik, biasanya otoritas moneter harus melakukan pengawasan pada keseluruhan sistem. Uang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem ekonomi moderen. Ekonomi moderen tidak akan mencapai tingkat pengembangannya tanpa ada uang. Uang dalam roda pembangunan ekonomi, ibarat sebagai “roda” dalam putaran industri. (Muhamad, 2002:11)

Sektor moneter merupakan jaringan yang penting dan mempengaruhi sektor ekonomi riil. Jadi kebijakan moneter merupakan instrumen penting dari kebijakan dalam sistem ekonomi moderen. Hal ini juga berlaku dalam sistem ekonomi Islam, akan tetapi perbedaannya adalah terletak pada tujuan dan larangan bunga dalam Islam. (Muhamad, 2002 :19)

Sebagai bagian dari keseluruhan sistem ekonomi suatu negara maka stabilitas moneter harus selalu terjaga. Stabilitas moneter akan sangat menentukan kelancaran roda perekonomian suatu negara secara keseluruhan. Dengan demikian diperlukan suatu lembaga yang secara khusus bertugas menjaga stabilitas moneter. Di Indonesia Bank Indonesia ditunjuk sebagai lembaga negara yang bertugas melaksanakan kebijakan moneter. Peran dan tugas utama Bank Indonesia difokuskan pada tiga sub sistem perekonomian. Tiga sub sistem tersebut terdiri dari moneter, perbankan dan pembayaran. Pelaksanaan tiga bidang tersebut akan sangat menentukan keberhasilan Bank Indonesia dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu mempertahankan dan memelihara stabilitas nilai mata uang (rupiah). Ibnu Khaldun sebagai pemikir besar turut menyinggung mengenai kebijakan sistem moneter. Dalam hal ini pemerintah berperan dalam mengelola dan mengontrol peredaran mata uang (Rohani :2002).

Ilmu ekonomi Islam terutama mengenai permasalahan yang menyangkut uang sangat beragam. Terdapat ahli ekonomi yang menyokong pandangan, bahwa ilmu ekonomi adalah mengenai perilaku manusia yang berhubungan dengan kegiatan mendapatkan uang dan membelanjakan uang. Pandangan ini semakin bertambah. Permasalahan ekonomi umat manusia yang fundamental bersumber dari kenyataan bahwa manusia mempunyai kebutuhan. Kebutuhan ini pada umumnya tidak dapat dipenuhi tanpa mengeluarkan sumber daya energi manusia serta peralatan material yang terbatas. Bila kita memiliki sarana tidak terbatas untuk memenuhi semua jenis kebutuhan maka masalah ekonomi tidak akan timbul (Abdul Manan, 1993 :19).

Menurut Chapra (2001:125) berbagai kontribusi pemikiran dari sejumlah besar ulama selama berabad-abad mencapai puncaknya pada karya Ibnu Khaldun, *Muqaddimah* yang secara literal berarti pendahuluan. *Muqaddimah* merupakan sebuah kitab yang bersifat ensiklopedis karena jenis permasalahan yang dikemukakannya

mencakup bahasan yang luas sekali. Hal ini menarik minat kalangan ilmuwan sosial, teologi, sejarah, bahkan ekonomi untuk mengkaji kembali karya tersebut (Sopyan,2000:1).

Ibnu Khaldun menegaskan seperti dikutip Adiwarmanto, kekayaan suatu negara bukanlah ditentukan dari banyaknya uang dinegara tersebut, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut serta neraca pembayaran yang positif. Dalam Muqaddimah, Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa uang tidak perlu mengandung emas dan perak, tetapi emas dan perak menjadi standar nilai uang. Uang yang tidak mengandung emas dan perak merupakan jaminan pemerintah menetapkan nilainya. Karena itu, pemerintah tidak boleh mengubahnya. Pemerintah wajib menjaga nilai uang yang dicetaknya karena masyarakat menerimanya tidak lagi berdasarkan berapa kandungan emas perak di dalamnya. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun selain menyarankan digunakannya uang standar emas/perak, beliau juga menyarankan konstannya harga emas dan perak. Harga-harga lain boleh berfluktuasi, tetapi tidak untuk harga emas dan perak (Muqaddimah, 2 :274).

Guna mewujudkan keadilan dan stabilitas pasar, pemerintah melakukan kontrol ekonomi dengan instrumen regulasi/peraturan. Di samping itu kebijakan moneter juga mempunyai andil dalam mewujudkan stabilitas pasar. Negara bertanggung jawab untuk mengontrol ekspansi mata uang dan mengawasi penurunan nilai uang karena kedua masalah pokok ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. Pemerintah melaksanakan tanggung jawab ini dengan menetapkan kebijakan moneter. Untuk menjamin berfungsinya sistem moneter secara baik, biasanya otoritas moneter harus melakukan pengawasan pada keseluruhan sistem (Muhamad, 2002:19)

Tujuan utama kebijakan moneter di Indonesia adalah untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri dan nilai tukar rupiah terhadap uang asing, khususnya dolar AS. Dengan demikian, selain stabilitas ekonomi secara keseluruhan bisa dijaga, keseimbangan neraca pembayaran melalui perubahan nilai kurs rupiah yang terkendali bisa dicapai pula (Tulus,1996 :236). Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah akan mempengaruhi pola kerja ekonomi, termasuk perbankan. Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang tidak terlepas dari pengelolaan uang masyarakat, baik individu maupun lembaga.

Uang dalam perekonomian mempunyai arti yang sangat penting. Ketidakstabilan alat tukar itu, karena instabilitas nilai tukar sehingga akan mengakibatkan perekonomian suatu bangsa bahkan dunia tidak berjalan pada titik keseimbangan. Akibatnya akan semakin sulit merealisasikan keadilan sosial, ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Menurut Nopirin (1992) uang adalah sesuatu yang dapat dipakai/diterima untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa maupun utang. Terkait dengan fungsi tersebut, terdapat perbedaan antara konsep uang dalam ekonomi Islam dengan konsep ekonomi konvensional. Fungsi uang dalam ekonomi konvensional ada tiga, yaitu sebagai alat pertukaran (*medium of exchange*), satuan nilai (*unit of account*) dan sebagai penyimpan nilai (*store of value*). Sementara dalam ekonomi Islam, fungsi uang hanya dikenal sebagai alat pertukaran (tegasnya Islam mengenal uang sebagai media untuk mengubah barang dari suatu bentuk ke bentuk yang lain) dan sebagai satuan nilai (Adiwarmanto,2002).

Muqaddimah mengandung sejumlah besar pembahasan tentang prinsip-prinsip ekonomi, sebagian dari pembahasannya benar-benar merupakan kontribusi asli Ibnu Khaldun kepada pemikiran ekonomi. Pandangan Ibnu Khaldun tentang prinsip-prinsip ekonomi demikian mendalam dan jauh ke depan, sehingga sejumlah teori yang dikemukakannya beberapa abad yang lalu dipandang sebagai pelopor dari sebagian formulasi modern yang lebih canggih dari teori-teori itu (Chapra,2001:126).

Tentang uang, Ibnu Khaldun menegaskan bahwa banyaknya uang yang beredar di suatu negara bukan merupakan jaminan kayanya negara tersebut. Hal tersebut justru dapat dilihat dari tingkat produksi negara itu dan neraca pembayaran yang positif. Dalam hal ini bisa saja suatu negara mencetak uang sebanyak-banyaknya, namun bila hal itu bukan merupakan refleksi pesatnya pertumbuhan sektor produksi. Uang yang melimpah tidak ada nilainya, justru sektor produksilah yang menjadi motor pembangunan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja, dan menimbulkan permintaan atas faktor produksi lainnya. Selain itu Ibnu Khaldun juga menyatakan bahwa uang tidak harus mengandung emas dan perak, namun keduanya cukup dijadikan sebagai standar nilai uang sementara pemerintah menetapkan nilainya secara konsisten (*Muqaddimah*, I :407).

Berdasarkan pada uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian akan mengkaji konsep Ibnu Khaldun tentang uang dan kebijakan moneter dalam perekonomian dan relevansi pemikirannya terhadap kebijakan moneter di Indonesia.

TINJAUAN LITERATUR

Konsep Uang dan Sistem Moneter

Uang merupakan alat transaksi yang sangat berperan dalam perekonomian. Masyarakat umumnya menggunakan uang untuk membeli barang-barang dan jasa. Sehingga setiap orang puas pada pekerjaannya yang sudah sesuai untuk mendapatkan penghasilan dalam bentuk uang.

Berbicara tentang uang, Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi dan neraca pembayaran yang positif di negara tersebut (Muhammad,2002:30).

Ditegaskan Ibnu Khaldun, bahwa neraca pembayaran yang positif akan meningkatkan kekayaan negara tersebut. Hal ini disebabkan neraca pembayaran yang positif menggambarkan dua hal, yaitu :

- a. Tingkat produksi negara tersebut untuk suatu jenis komoditi lebih tinggi daripada tingkat permintaan domestiknya, atau *supply* lebih besar dibanding *demand* sehingga memungkinkan negara tersebut melakukan ekspor.
- b. Tingkat efisiensi produksi negara tersebut lebih tinggi dibandingkan negara lain. Dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi, komoditi suatu negara mampu masuk ke negara lain dengan harga yang lebih kompetitif (Adiwarman,2002:13).

Ibnu Khaldun juga menyebutkan bahwa uang tidak harus mengandung emas dan perak. Yang lebih penting dilakukan adalah menjadikan emas dan perak sebagai

standar nilai uang, sementara pemerintah menetapkan nilainya secara konsisten (Adiwarman,2002:14). Ketika nilai uang tidak berubah, kenaikan harga atau penurunan harga semata-mata ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Setiap barang akan memiliki harga keseimbangan. Misalnya, jika di suatu kota makanan yang tersedia lebih banyak daripada yang diperlukan, maka harga makanan akan murah. Demikian pula sebaliknya (Adiwarman,2002:14).

Pratama Rahardja menyebutkan bahwa nilai uang dapat diukur atas dasar harga barang didalam suatu negara maupun dengan mata uang dari negara asing. Harga barang-barang dan jasa dapat menentukan daya beli uang, artinya bahwa dengan sejumlah uang tertentu akan diperoleh sejumlah barang yang lebih banyak jika harga barang-barang tersebut turun, dan sebaliknya jika harga-harga tersebut naik maka jumlah barang yang dapat dibeli dengan uang tersebut akan berkurang. Membicarakan mengenai permintaan akan uang merupakan bidang yang terkait erat dengan teori moneter.

Ibnu Khaldun sebagai pemikir besar turut menyinggung mengenai kebijakan sistem moneter. Dalam pembahasan Ibnu Khaldun terdapat kata *sikkah* atau pencetakan uang logam. Jabatan *sikkah* mengurus uang logam yang dipergunakan oleh kaum muslimin dalam transaksi komersial, dengan menjaga terjadinya kecurangan. Lebih lanjut beliau menyebutkan bahwa *sikkah* menunjukkan kontrol terhadap proses pencetakan dan pengawasan terhadap operasi keseluruhan yang berhubungan dengan pembuatan uang logam. Adapun tujuan didirikannya *sikkah* adalah untuk menghindari pemalsuan mata uang yang beredar dalam transaksi, maka untuk itu pemerintah menentukan kurs untuk uang sebagaimana telah ditetapkan pada masa Umar r.a. Artinya pemerintah berperan dalam mengelola dan mengontrol peredaran mata uang sehingga dapat menjamin stabilitas nilai mata uang dan mengontrol ekspansi mata uang (Rohani :2002).

Dari paparan di atas jelas Ibnu Khaldun menegaskan bahwa pemerintah dan masalah uang memiliki keterkaitan yang sangat erat. Dalam hal ini pemerintah atau dalam pandangan Ibnu Khaldun lebih ditekankan dengan kata *sikkah* atau pencetak uang logam, mempunyai peranan dalam sistem moneter. Lebih tegasnya pemerintah berperan dalam mengelola dan mengontrol peredaran mata uang sehingga stabilitas nilai mata uang benar-benar terjaga. Mengenai uang itu sendiri, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa suatu negara tidak dikatakan kaya hanya dengan melihat banyaknya uang yang beredar di negara tersebut. Namun justru hal itu dilihat dari neraca pembayaran yang positif dan tingkat produksi negara yang bersangkutan. Dan beliau juga menyebutkan bahwa uang tersebut tidak harus terbuat dari emas, namun kedua logam mulia tersebut cukup dijadikan sebagai standar nilai uang.

Emas dan Perak sebagai Mata Uang Pilihan

Diskusi teoritis tentang uang sudah ada sejak pemikiran tentang ekonomi itu ada. Meskipun demikian tetaplah penting mengetahui garis besar sejarah perkembangan uang. Para ahli ekonomi Klasik dahulu menulis tentang uang, yang mereka pikirkan adalah logam mulia dan mata uang yang dibuat dari logam mulia itu. Orang-orang juga menggunakan lembaran-lembaran kertas dalam jual beli dan pinjam meminjam tetapi lembaran kertas yang ditulis atau dicetak itu biasanya merupakan perjanjian atau

pernyataan kesediaan membayar sejumlah emas atau perak, baik atas permintaan atau pada suatu waktu yang telah ditentukan (Prawiranegara, 1988 : 145).

Surat-surat (uang kertas) ini dikeluarkan baik oleh pemerintah maupun swasta. Kadang-kadang orang menggunakan surat sertifikat yang menyatakan bahwa uang logam disimpan di bank dan dapat diambil dengan menunjukkan sertifikat (surat pengakuan) tersebut. Setelah orang makin terbiasa dengan perbankan, semakin banyak uang kertas bank yang beredar menggantikan uang logam. Uang kertas bank merupakan pernyataan kesanggupan sebuah bank untuk membayar sejumlah “uang” (= logam mulia) atas permintaan. Tetapi bila suatu bank sudah mempunyai reputasi baik dalam arti sewaktu-waktu dapat menebus uang-uang kertas tersebut dengan uang logam kapan saja diminta menyebabkan kebanyakan orang yang menerima uang kertas itu tidak merasa perlu menukarkan uang kertasnya dengan uang logam tetapi menggunakan uang kertas bank sebagai alat pembayaran kepada pihak lain.

Pada kenyatannya terdapat perbedaan antara uang kertas dengan uang logam (logam mulia). Zaim Saidi menyatakan bahwa yang membedakan kertas itu dengan kertas lainnya hanya gambarnya saja. Dalam sistem uang kertas ini, kita sebagai warga negara dan sebagai manusia dipaksa oleh sistem (negara) untuk percaya bahwa selebar kertas tersebut mempunyai nilai tertentu. Berbeda dengan emas dan perak, tak ada yang dapat menentukan dengan semena-mena harga emas dan perak. Karena emas dan perak ditentukan oleh mekanisme pasar, jadi nilainya akan tetap.

Konsep Uang Menurut Ibn Khaldun

Ibnu Khaldun bukan hanya seorang perintis dibidang ekonomi sosial, ternyata juga tokoh ini menyadari adanya dampak besar faktor-faktor ekonomi terhadap kehidupan sosial politik.

Menurut Ibnu Khaldun, tingkat produksi dan neraca pembayaran yang positif merupakan penentu kekayaan suatu negara. Ini menunjukkan bahwa banyaknya uang yang beredar bukan standar penentu kayanya suatu negara. Sementara itu penukaran melalui barter (barang dengan barang) telah dikenal manusia sejak zaman kono, dimana saat itu uang belum beredar. Pertukaran barter dapat mengundang niat buruk berbagai macam transaksi, dan akibat yang merusak moral yang ditimbulkannya sangat boleh jadi merupakan alasan mengapa Nabi Saw tidak membenarkannya (Akram Khan,t.t :179).

Dengan menegaskan bahwa transaksi-transaksi serupa ini diizinkan bila dinilai atau dihargai dengan satuan-satuan moneter, ini berarti Nabi Saw meletakkan dasar sistem moneter, bukan dasar pertukaran barter. Dalam beberapa abad berikutnya, uang dikembangkan untuk berperan sebagai ukuran nilai dan alat tukar. Hingga pada abad keenam Masehi, dengan kedatangan Nabi Muhammad Saw, uang telah dikenal di masyarakat. Uang logam dari berbagai jenis dicetak dan disebarluaskan di dunia (Monzer Khaf,t.t:96).

Dalam buku-buku ke-Islaman, uang dibahas sebagai salah satu alat transaksi, perantara untuk menilai uang dan jasa; dan ia tidak boleh memainkan peranan sebagai barang. Sedangkan para ekonom mempergunakan istilah uang tidak merujuk kepada kekayaan (wealth) tetapi yang dimaksudkan disini (perdefinisi) uang adalah *stock asset* yang dapat dipergunakan untuk keperluan transaksi. Karena uang merupakan stock

asset yang dipakai untuk transaksi maka jumlah uang adalah jumlah asset (Tedy Herlambang: 2001).

Dari definisi tersebut jelaslah apa yang dimaksud dengan uang. Definisi-definisi tersebut merupakan definisi yang fungsional. Dimana uang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menunjukkan fungsi tertentu. Definisi tersebut bukanlah merupakan definisi yang bertalian dengan sifat-sifat kebendaan.

Kebijakan Moneter dan Dampak Ekonominya

Kebijakan moneter adalah bagian dari kebijakan ekonomi makro yang meliputi pula kebijakan lain. Selain kebijakan moneter, pemerintah secara simultan melaksanakan kebijakan fiskal (anggaran), kebijakan perdagangan luar negeri (*trade policy*), dan kebijakan mengenai peraturan dan perizinan (*licencing & regulation*). Selain itu pemerintah juga melaksanakan kebijakan khusus tentang investasi, pasar modal serta sektor produksi. Demikian erat keterkaitan antara kebijakan moneter dengan ekonomi makro. Berikut akan dibahas lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Kebijakan Moneter dalam Konteks Kebijakan Ekonomi Makro

Kebijakan moneter merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan ekonomi makro. Oleh karena itu kebijakan moneter ditujukan untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro. Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter mempunyai tugas mengatur jumlah dan alokasi uang beredar serta mempengaruhi tingkat bunga sedemikian rupa untuk mencapai sasaran kebijakan makro, yakni pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan termasuk pemerataan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja serta kestabilan harga dan keseimbangan neraca pembayaran.

Pada dasarnya, semua sasaran tersebut perlu dicapai secara serempak dan maksimal. Dengan kata lain, melalui kebijakan moneter diharapkan secara serempak dapat dicapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tingkat pengangguran dan inflasi yang rendah serta perkembangan keseimbangan neraca pembayaran yang mantap. Namun, dikarenakan usaha-usaha untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut dapat menimbulkan dampak yang kontradiktif, maka sangat sulit untuk mencapai semua sasaran dengan serempak dan maksimal. Sebagai contoh, apabila bank sentral melakukan ekspansi moneter untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja, maka tindakan tersebut dapat menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan terhadap kestabilan harga dan keseimbangan neraca pembayaran. Sebaliknya, kebijaksanaan moneter yang ketat dapat menunjang tercapainya kestabilan harga dan keseimbangan neraca pembayaran, namun kebijakan tersebut akan mengakibatkan menurunnya laju pertumbuhan ekonomi dan meluasnya tingkat pengangguran (Iswardono, 158:1996).

Salah satu sasaran kebijakan moneter dapat dicapai melalui pengaturan jumlah uang beredar. Dalam hal ini uang sebagai alat sekaligus bagian yang integral dalam kehidupan kita, terutama dalam proses transaksi berkaitan erat dengan kebijakan moneter. Karena pemerintah sebagai pemegang tampuk negara mempunyai suatu sistem yang dianut dalam mengelola masalah moneter negara, maka uang yang ada dan beredar di negara ini tak lepas dari pantauan pemerintah.

Struktur ekonomi suatu negara sebetulnya merupakan pencerminan profitabilitas dari sektor ekonomi secara umum. Artinya, sektor yang peranannya meningkat menunjukkan profitabilitas sektor tersebut sedang meningkat pula dan sebaliknya sektor yang dalam tahap menurun peranannya dalam perekonomian menunjukkan hal sama dalam profitabilitasnya (Sjahrir, 27:1995). Terkait dengan hal tersebut pemerintah sebagai pemegang tampuk negara harus dapat menetapkan kebijakan guna mencapai sasaran yang ingin dicapai. Di dalam proses pencapaian sasaran kebijakan moneter sering dihadapkan pada gejolak perekonomian yang dapat menghambat sasaran yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan indikator yang dapat memberi petunjuk apakah perkembangan moneter tetap terarah pada usaha pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator tersebut berupa suku bunga atau besaran moneter. Dengan demikian kedua variabel moneter tersebut mempunyai dua fungsi, yakni sebagai sasaran menengah dan indikator. Dalam perumusan kebijakan moneter, kedua variabel moneter tersebut digunakan sebagai sasaran menengah karena merupakan variabel yang akan dicapai terlebih dahulu agar sasaran kebijakan ekonomi makro dapat dicapai, sedangkan dalam pelaksanaannya kedua variabel tersebut bertindak sebagai indikator karena memberi petunjuk tentang arah perkembangan moneter.

Di dalam pelaksanaan kebijakan moneter, Bank Indonesia menggunakan piranti berupa cadangan wajib (*reserve requirement*), operasi pasar terbuka (*open market operation*), dan fasilitas diskonto. Untuk cadangan wajib BI menetapkan cadangan minimum yang harus dipelihara oleh bank-bank, sedangkan untuk melaksanakan operasi pasar terbuka, BI memperdagangkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Sementara itu, fasilitas diskonto disediakan dalam dua macam, yaitu fasilitas diskonto I untuk mengatasi kesulitan likuiditas bank sehari-hari, dan fasilitas diskonto II untuk mengatasi kesulitan likuiditas bank yang disebabkan oleh terjadinya *mismatch* dalam pengelolaan dana oleh bank-bank.

Dilema dalam menentukan kebijakan moneter akan timbul bagi negara yang sekaligus menghadapi kelesuan perekonomian dalam negeri dan mengalami tekanan yang berat pada neraca pembayaran. Kebijakan moneter longgar yang pada umumnya ditempuh untuk mengatasi kelesuan perekonomian dalam negeri dikhawatirkan semakin menekan neraca pembayaran dan sebaliknya kebijakan moneter ketat yang biasa dilakukan terutama untuk menjaga kestabilan neraca pembayaran dikhawatirkan semakin mempertajam kelesuan perekonomian dalam negeri. Dalam menghadapi dilema tersebut, kebijakan moneter yang akan ditempuh disesuaikan dengan prioritas masalah yang harus segera diatasi. Bila tekanan pada neraca pembayaran perlu diatasi terlebih dahulu demi menyelamatkan perekonomian secara keseluruhan maka ditempuh kebijakan moneter ketat dan sebaliknya apabila kelesuan perekonomian dalam negeri perlu diatasi lebih dahulu, ditempuh kebijakan moneter longgar.

Instrumen Moneter

Secara tidak langsung bank sentral memiliki pengaruh signifikan terhadap arah tingkat harga, out put, dan nilai tukar uang suatu Negara. Mereka mengendalikan penawaran akan uang, kredit bank, serta menentukan tingkat suku bunga, arus kredit

dan perkembangan sektor finansial pada sebuah perekonomian. Bank sentral juga mampu mengendalikan jumlah maksimal suku bunga yang dapat dibayarkan terhadap jumlah simpanan tertentu kepada bank-bank dan menentukan proporsi saham yang dapat dibeli melalui kredit (Adiwarman, 189:2002).

Tindakan-tindakan bank sentral dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan tersebut mengalami evolusi panjang, begitu juga dengan bentuk kebijakan itu sendiri. Adapun untuk mengimplementasikan kebijakannya, bank sentral menggunakan empat instrument atau alat utama, yaitu :

1) Operasi Pasar Terbuka

Operasi pasar terbuka (*open market operation*) merupakan pembelian dan penjualan sekuritas pemerintah (*government securities*) oleh bank sentral. Sekuritas pemerintah tersebut biasanya berbentuk obligasi. Adapun yang digunakan oleh bank sentral adalah sekuritas pemerintah jangka pendek.

Disaat pemerintah melakukan kegiatan jual beli sekuritas tersebut, perekonomian akan dipengaruhi oleh perubahan jumlah agio cadangan (*reserve*) investasi finansial, perubahan harga dan hasil sekuritas serta perubahan perkiraan keseluruhan perekonomian.

2) Tingkat Diskonto

Instrumen kebijakan moneter ini berkaitan dengan fasilitas bank-bank untuk meminjam uang secara langsung kepada bank sentral. Pada saat ini hanya sebagian kecil cadangan yang dimiliki oleh bank-bank yang dipinjam dari bank sentral. Dana yang dipinjam oleh bank pada umumnya digunakan untuk membayar dana simpanan kepada nasabah atau deposan serta menjaga arus cadangan ke luar. Biasanya peminjaman tersebut dilakukan untuk penyesuaian dengan jangka waktu hanya beberapa hari.

Akses bank-bank terhadap sistem peminjaman ke bank sentral tidak otomatis karena besar dana pinjaman ditentukan. Selain itu, ada peraturan bank sentral mengenai evaluasi kelayakan alasan peminjaman dan penyesuaian tingkat diskonto. Kadang kala, tingkat diskonto dirubah untuk menciptakan sinyal yang nyata tentang arah tingkat suku bunga yang diinginkan oleh bank sentral (Adiwarman, 192:2002).

3) Cadangan Minimum

Perbankan merupakan salah satu industri yang paling banyak diatur oleh undang-undang. Salah satu bentuk pengaturan tersebut adalah ketentuan cadangan minimum (*reserve requirement*) yang biasanya ditetapkan berdasarkan undang-undang perbankan yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam prakteknya, cadangan minimum menentukan besar presentase minimum dana simpanan deposan yang harus dicadangkan oleh bank, baik di kas maupun di rekeningnya di Bank sentral. Saat ini presentase cadangan minimum dihitung berdasarkan simpanan total, baik terhadap deposan, giro, tabungan, ataupun deposito (Adiwarman, 193:2002).

4) Imbauan Moral

Imbauan moral digunakan oleh bank sentral dalam rangka mendorong institusi finansial agar membela kepentingan publik. Biasanya mereka menggunakan imbauan moral untuk meyakinkan para bankir dan manajer senior institusi finansial agar lebih

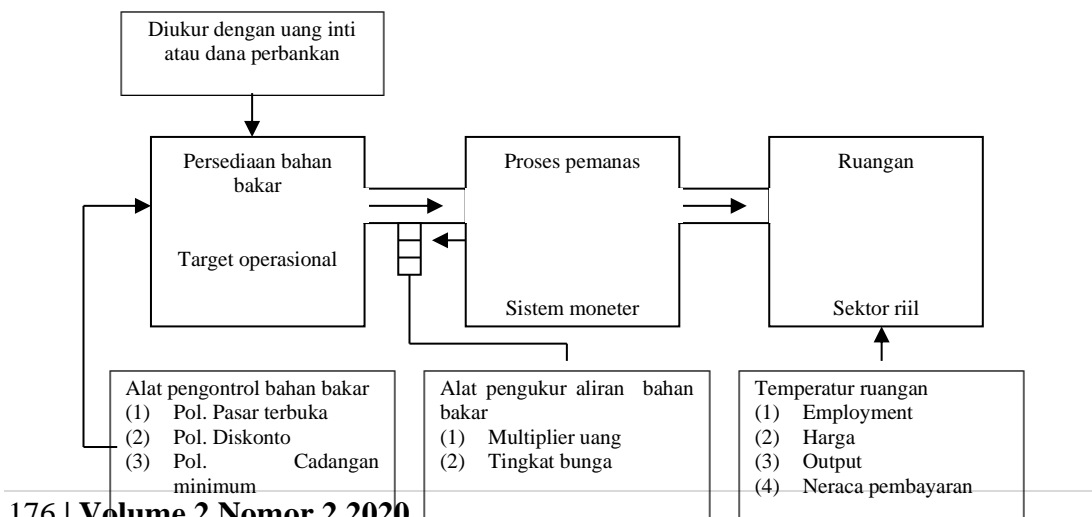
memperhatikan kepentingan jangka panjang daripada kepentingan jangka pendek institusinya. Contohnya, pada saat terjadi inflasi, bank sentral menyarankan kepada institusi-institusi finansial agar mengurangi pemberian pinjaman (kredit) untuk mendinginkan perekonomian yang sedang panas.

Dalam praktiknya, imbauan moral dapat ditransformasikan menjadi suatu instrument moneter dengan cara mencatat institusi-institusi yang bekerjasama dan yang tidak pada saat meminjamkan dengan *discount window*. Selain itu, karena bank sentral mempunyai wewenang melarang penggabungan (merger) bank, maka imbauan moral dapat digunakan untyuk mencapai sasaran-sasaran kebijakan moneter (Adiwarman. 194:2002).

Implementasi Kebijakan Moneter

Penentuan tujuan kebijakan moneter seperti pertumbuhan, inflasi serta neraca pembayaran yang sehat hanyalah merupakan salah satu bagian dari kebijakan moneter. Masih banyak masalah yang perlu dipecahkan, terutama dalam hal implementasinya. Masalah ini mencakup, pertama bahwa penguasa moneter harus menentukan arah yang hendak dituju untuk mencapai sasaran kebijakan, seperti misalnya out put, employment serta harga. Kedua, mereka harus menentukan bagaimana cara untuk mengatur / merubah instrumen kebijakan moneter (seperti cadangan minimum, politik diskonto setra jual beli surat berharga) supaya tujuan/ sasaran kebijakan moneter tercapai. Terkait dengan hal ini diperlukan indikator kebijakan moneter, yakni variabel ekonomi yang memberikan informasi tentang gerakan/ perubahan dalam sektor riil apakah sudah sesuai dengan sasaran atau belum.

Pemilihan indikator sebenarnya merupakan pemilihan variabel moneter yang secara konsisten memberi informasi tentang pengaruh kebijakan moneter terhadap perekonomian. Ini memerlukan adanya hubungan pasti (dapat diperkirakan) antara indikator tersebut dengan sasaran kebijakan moneter. Perubahan sektor riil dapat diperkirakan dari adanya perubahan dalam indikator. Dengan melihat indikator ini dapat diperkirakan apakah arah kebijakan moneter tersebut dapat sejalan dengan yang diinginkan atau tidak. Jika tidak, maka penguasa moneter dapat mengubah instrumen kebijakan moneter. Dengan demikian indikator ini memberikan informasi apakah sasarannya akan tercapai atau tidak. Berikut akan disajikan gambar proses implementasi kebijakan moneter :



Gambar 1. Proses Implementasi Kebijakan Moneter

Sumber : Adi Warman A. Karim, 2002 : 87

Berdasarkan gambar 1 di atas, persediaan bahan bakar diukur dengan besarnya uang inti atau dana perbankan. Untuk menganalisa efek dari kebijakan moneter terhadap sektor riil, Bank sentral melihat alat pengukur (indikator) pada sistem moneter yakni bunga. Dengan melihat indikator ini bank sentral dapat mengetahui apakah arah kebijakan moneter sudah tepat atau belum (Nopirin, 81:1987).

Kebijakan Moneter Menurut Ibn Khaldun

Terkait dengan sistem moneter, pemerintah mempunyai kebijakan sendiri untuk mengelola roda perekonomian termasuk di dalamnya mengatur hal yang terkait dengan standar moneter/standar mata uang. Standar moneter diartikan sebagai sistem moneter yang didasarkan atas standar nilai uang.

Ditegaskan bahwa Ibnu Khaldun membahas beberapa tugas dan fungsi pemerintah dalam perekonomian. Dalam perekonomian pemerintah memiliki peran untuk mewujudkan suasana yang mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat dan menjamin serta menjaga operasi pasar yang adil dan teratur. Oleh karena itu pemerintah benar-benar dituntut untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam perekonomian, diantaranya :

a. Dalam mekanisme pasar, Ibnu khaldun menolak keterlibatan pemerintah secara langsung dalam usaha yang merupakan sumber penghidupan bagi rakyatnya, hal ini dikarenakan tindakan tersebut menyebabkan rakyat kehilangan motivasi untuk bekerja dan berusaha karena kompetisi yang tidak seimbang. Hingga pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya penerimaan pajak.

b. Pemerintah menyelenggarakan sebuah institusi pengawas pasar atau *hishab* dalam rangka menciptakan mekanisme pasar yang adil dan teratur serta mengaplikasikan hukuman dan tindakan korektif terhadap penyimpangan pasar.

c. Mengenai keuangan publik, Ibnu Khaldun memandang perlunya penetapan beban pajak yang rendah pada rakyat terkait dengan penerimaan pajak. Sementara untuk kebijakan pengeluaran negara, ia menyarankan agar pemerintah menghindari pemborosan dalam belanja dan tidak perlu ada dana cadangan yang disimpan oleh negara serta adanya dana yang dialokasikan untuk bantuan sosial kepada pihak yang memerlukan dalam rangka pemerataan kesejahteraan rakyat.

d. Terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni tentang uang Ibnu Khaldun memandang perlunya pemerintah menjaga stabilitas pasar dengan menjamin stabilitas nilai mata uang dan mengontrol ekspansi mata uang (Rohani :2002).

Adapun penelitian yang akan dilakukan ini lebih difokuskan pada pemikiran Ibnu Khaldun tentang uang serta kebijakan moneter yang ada di Indonesia, sehingga dapat dilihat apakah konsep Ibnu Khaldun tersebut dapat dijadikan landasan kebijakan moneter di Indonesia atau tidak.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan *library research design* (desain studi pustaka), yaitu suatu penelitian dengan cara mempelajari, meneliti dan mengkaji bahan-bahan pustaka yang relevan. Hal ini ditujukan untuk mendiskripsikan pemikiran Ibnu Khaldun yang berkaitan dengan judul yang telah diajukan dalam penelitian ini serta menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka pendekatan yang digunakan adalah :

- a. Pendekatan deskriptif, yaitu dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pemikiran tokoh dengan cara menguraikan seluruh konsep / pemikiran tokoh yang relevan dengan topik penelitian.
- b. Pendekatan *historis* yaitu pendekatan yang berusaha mempelajari dan mengolah data masa lalu serta berusaha menelusuri asal usul dan pertumbuhannya (Ali,1995:76). Pendekatan ini dimaksudkan untuk menyusun riwayat hidup dan pendidikan tokoh yang bersangkutan agar dapat dilihat pengaruh-pengaruh yang melatarbelakangi munculnya pemikiran tokoh tersebut.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara-cara yang dapat digunakan dalam pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengkaji berbagai buku (literatur) yang relevan dengan pokok persoalan yang akan diteliti. Dalam hal ini digolongkan menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Sumber primer, yakni berupa karya tokoh yang bersangkutan, dalam hal ini adalah kitab *Muqaddimah* Ibnu Khaldun.
- b. Sumber sekunder yakni literatur-literatur yang ditulis orang lain sebagai analisis atau pengembangan dari pemikiran tokoh yang bersangkutan ataupun literatur-literatur lain yang relevan dengan topik penelitian. Literatur-literatur tersebut dapat berupa Buku, Ensiklopedia, Jurnal dan Majalah.

Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah didapatkan, maka semua data yang berhubungan dan relevan dengan topik yang dibahas dikumpulkan dari berbagai sumber dan diklasifikasikan, kemudian data tersebut diuraikan dengan rinci, jelas dan sistematis sehingga pada akhirnya dapat diambil kesimpulan dari topik yang telah dibahas. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu kajian atau tafsiran terhadap pokok-pokok fikiran yang terdapat dalam satu buku, sehingga dapat diungkapkan pokok-pokok fikiran tersebut dan hubungannya dengan cara yang bermakna (Komaruddin,2000:16). Teknik ini dipadukan dengan metode kesinambungan historis guna melihat keterkaitan tokoh yang bersangkutan dengan lingkungan historis dan pengaruh yang dialami dalam

perjalanan hidupnya (Bakker,1990:64). Kemudian dilakukan pembahasan untuk diambil suatu kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uang merupakan bagian yang integral dari kehidupan kita sehari-hari. Dan ada pula yang berpendapat bahwa uang merupakan “darah”-nya perekonomian, karena di dalam masyarakat yang moderen dewasa ini, di mana mekanisme perekonomian berdasarkan lalu lintas barang dan jasa semua kegiatan-kegiatan ekonomi tadi akan memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai tujuannya (Iswardono. 3:1996).

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa kekayaan suatu negara tidak dilihat dari banyaknya uang yang beredar, tapi dilihat dari neraca pembayaran yang positif serta tingkat produksi di negara yang bersangkutan. Selain itu beliau menekankan bahwa uang tidak harus terbuat dari emas dan perak, namun keduanya cukup dijadikan sebagai standar nilai uang. Terkait dengan permasalahan penentuan standar nilai uang oleh suatu pemerintahan, Indonesia memiliki kebijakan tersendiri. Dalam hal ini pemerintah memberlakukan uang kertas, sementara yang dijadikan standar nilai uangnya adalah dolar AS yang memang perekonomiannya menguasai hampir seluruh dunia. Meski jauh sebelum peradaban moderen muncul, uang dalam bentuk emas dan perak telah beredar dan membuktikan kejayaannya di dunia perekonomian, namun pada akhirnya seiring bergulirnya waktu kedua mata uang itu terlindas. Hingga saat ini banyak bermunculan mata uang, bahkan setiap negara memiliki mata uang sendiri.

Sementara itu, sistem perbankan Indonesia terutama menyangkut kebijakan moneter benar-benar diatur dan dikendalikan oleh pemerintah. Dimana dalam pelaksanaannya pemerintah memiliki piranti atau alat kebijakan moneter. Sekarang ini dolar dijadikan sebagai standar nilai uang, sementara kedudukan dolar sendiri kerap kali mengalami perubahan (berfluktuasi). Kejayaan uang kertas yang tidak dijamin dengan sesuatu itupun sebenarnya belum berlangsung lama, belum sampai 30 tahun, sejak Richard Nixon (Presiden AS kala itu) secara sepihak menghentikan sistem Bretton Wood, 1971. Dalam sistem Bretton Wood, mata uang dunia dikaitkan satu sama lain, diikat dengan dolar AS, yang nilainya secara fixed dijamin dengan emas (Zaim Saidi, 37:2002). Ini menunjukkan bahwa Amerika juga pernah memberlakukan standar nilai uang dengan emas.

Dalam bahasan ekonomi, standar moneter/uang ada dua macam yaitu standar barang (*commodity standard*) dan standar kepercayaan (*fiat standard*). Standar barang diartikan sebagai sistem moneter di mana nilai/tenaga beli uang dijamin sama dengan seberat tertentu barang (emas, perak dan sebagainya). Standar barang ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu standar emas, standar perak dan standar kembar (emas dan perak). Sementara standar kepercayaan diartikan sebagai sistem moneter di mana nilai/tenaga beli uang tidak dijamin dengan seberat tertentu barang (logam), tapi hanya atas dasar kepercayaan masyarakat mau menerima uang tersebut sebagai alat pembayaran (Iswardono, 34:1996). Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa standar nilai uang di Indonesia adalah dolar AS yang tidak dijamin dengan logam apapun (emas dan perak), pada kenyataannya telah menunjukkan hasil yang

kurang baik terhadap tatanan perekonomian Indonesia dan terbukti Indonesia mengalami krisis berkali-kali serta dampak yang ditimbulkan dari krisis tersebut mempengaruhi hampir seluruh tatanan kehidupan masyarakat Indonesia.

Saat ini banyak kalangan yang mulai melirik uang emas dan perak untuk dijadikan sebagai alat transaksi. Seperti halnya Perum Pegadaian yang mengeluarkan ONH dan Dompot Dhuafa serta lembaga sejenis yang mulai menerima pembayaran zakat dalam bentuk dinar dan dirham, bahkan pembayaran gaji karyawanpun menggunakan mata uang dinar dan dirham. Karena pada kenyataannya benar-benar telah membuktikan kejayaannya dan memang memiliki keunggulan. Namun Ibnu Khaldun tidak menekankan keharusan penggunaan mata uang emas dan perak, tapi lebih memunculkan bahasan untuk menjadikan emas dan perak sebagai standar nilai uang. Berdasarkan paparan tersebut penulis sepakat konsep Ibnu Khaldun tentang uang relevan jika diterapkan dalam kebijakan moneter di Indonesia, terkait dengan penentuan standar nilai uang. Artinya penggunaan emas dan perak tidak mutlak dijadikan sebagai mata uang tapi tetap harus dijadikan sebagai standar nilai uang.

KESIMPULAN

Setelah dilakukan pengkajian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai konsep uang Ibnu Khaldun serta Kebijakan Moneter di Indonesia, maka dapat ditarik benang merah bahwa : Konsep uang dan sistem moneter Ibnu Khaldun muncul dengan dipengaruhi oleh kondisi semasa Ibnu Khaldun hidup. Dalam catatan sejarah Ibnu Khaldun mengalami kondisi ekonomi dan politik yang berubah-ubah. Pada masa pemerintahan Bani Mamluk peredaran uang emas dan perak juga dirasakan oleh Ibnu Khaldun, bahkan pada masa itu nilai nominal uang lebih besar dari nilai intrinsiknya. Maka tak heran jika kemudian Ibnu Khaldun memunculkan konsep tersebut. Dengan melihat runtutan paparan yang ada, penyusun berpendapat bahwa konsep Ibnu Khaldun mengenai uang relevan jika diterapkan dalam sistem moneter Indonesia. Hal ini dilandasi oleh pertimbangan dimana kondisi Indonesia beberapa kali mengalami krisis yang merupakan dampak/hasil dari penggunaan dan penerapan sistem kapitalisasi global yang menggunakan uang hampa yang tidak memiliki standar emas dan perak. Karena jika emas yang dijadikan standar nilai uang maka akan terjadi kebebasan membuat emas dan terjaminnya pasar bebas emas dapat menjaga nilai pasar dari emas dan nilai nominal dari uang tetap sama. Selain itu segala bentuk uang kertas dan uang kredit bank dapat ditebus dengan emas, sehingga kesamaan nilai dapat dijamin di antara alat-alat penukar (pembayaran).

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi Abu & Ansori Umar Sitanggal, 1980, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip-Prinsip dan Tinjauan-Tinjauannya*, Surabaya:PT Bina Ilmu.

- Al-Assal Muhammad Ahmad & Abdul Karim Ahmad Fathi, 1998, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Semarang:CV Pustaka Pribadi.
- Azwar Karim, Adiwarmanto. 2002. *Ekonomi Mikro Syariah*. Jakarta : Rajawali Press.
- Baidan, Nashruddin. 1998. *Metodologi Penafsiran Al Qur'an*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Dahlan, Abdul Azis. 2000. *Ensiklopedi Hukum Islam. Cetakan Keempat*. Jakarta : PT Ihtiar Baru Van Hoeve
- Ismail, Muhammad. 1999. *Bunga Rampai Pemikiran Islam*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Kamal, Mustafa. 1997. *Wawasan Islam dan Ekonomi (Sebuah Bunga Rampai)*. Jakarta : LPFE. UI.
- Khaldun, Ibn. 2001. *Muqaddimah* (Terjemahan). Bandung : Al-Maarif
- Muhajir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi IV*. Yogyakarta : Rake Sarasin.
- Muhammad.2000. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.
- Nazir, Muhammad. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Rivai, Veitsal. 2007. *Bank and Financial Institution Management (Conventional and Sharia System)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta : 1994.
- Sutopo, Heribertus. 1998. *Pengantar Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Praktis*. Surakarta : Pusat Penelitian UNS.